

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN DITINJAU DARI NILAI DASAR EKONOMI ISLAM  
(STUDI PADA PKH DI DESA KAMBUNO KECAMATAN BULUKUMPA  
KABUPATEN BULUKUMBA)**

**Husniar<sup>1</sup>, Fathurrahman<sup>2</sup>, dan Sirajuddin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

hasniarhamdi@gmail.com<sup>1</sup>, Fathur40@yahoo.co.id<sup>2</sup>, sirajuddinroy@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Bulukumba regency is one of the districts that has welfare problems (poverty), one of which is in the village of Kambuno. this village is one of the villages that received social assistance in the form of the Family Hope Program (PKH). The purpose of this study is to find out, understand and explain how the implementation of the Family Hope Program (PKH) improves people's welfare when viewed from the basic values of Islamic economics in Kambuno Village. The type of research used is "Case Study". Case study is research that focuses on a particular case with the aim that it can be analyzed and observed. The data sources in this study were primary data in the form of direct interviews with relevant informants and secondary data in the form of lists of PKH beneficiaries. The results of this study indicate that the implementation of PKH when viewed from the basic values of Islamic economics, namely in terms of takaful does not provide social security to PKH participants from a fairness perspective, it has not been fully implemented, this is indicated by the inaccuracy of the target of receiving PKH assistance, as well as delays in disbursement. funds that are sometimes experienced by some KPM, and seen from the value of responsibility that has gone well, this is shown by the assistants or PKH participants having fulfilled their rights and obligations*

**Keywords:** PKH, justice, responsibility, takaful.

**ABSTRAK**

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang mengalami masalah kesejahteraan (kemiskinan) salah satunya berada di desa kambuno. desa ini merupakan salah satu desa yang menerima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari nilai dasar ekonomi Islam di Desa Kambuno. Jenis penelitian yang digunakan

adalah “Studi Kasus”. Studi kasus adalah penelitian yang memfokuskan pada suatu kasus tertentu dengan tujuan agar dapat dianalisis dan diamati. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara langsung dengan informan terkait dan data sekunder berupa daftar penerima bantuan PKH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH jika dilihat dari nilai dasar ekonomi Islam yaitu dari segi *takaful* tidak memberikan jaminan sosial kepada peserta PKH dari segi keadilan, belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini ditandai dengan ketidaktepatan target penerimaan bantuan PKH, serta keterlambatan pencairan dana yang terkadang dialami oleh sebagian KPM, dan dilihat dari nilai tanggung jawab yang sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan para pendamping atau peserta PKH telah memenuhi hak dan kewajibannya

**Kata Kunci:** PKH, keadilan, tanggungjawab, *takaful*.

## A. PENDAHULUAN

Setiap negara berkembang mengalami permasalahan mengenai kesejahteraan bahkan berdirinya suatu Negara dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan warga Negara tersebut. Mulai dari metode yang dipakai, hukum yang berlaku serta pendekatan maupun kebijakan yang dipilih hal ini semua dilakukan untuk menggapai kesejahteraan<sup>1</sup>. Kesejahteraan adalah tujuan agama Islam salah satunya pada aspek ekonomi. Dalam hal ini Allah telah mengungkapkan konsep kesejahteraan dalam QS Al-Jatsiyah (45):13.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan dia telah mengarahkan untuk manusia apa yang di langit dan bumi semuanya ( sebagai karunianya) sungguh yang demikian itu betul terdapat petunjuk (kuasa Allah) bagi mereka yang senantiasa menggunakan akal nya”.<sup>2</sup>

QS Al- Jatsiyah ayat 13 menjelaskan bahwa Allah telah menyerahkan yang ada dilangit maupun dibum sebagai karunia Allah kepada manusia dan sebagai sarana untuk merasakan kesejahteraan oleh karena itu manusia dituntut selalu menggunakan

<sup>1</sup> Agung Eko Purwana, “kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam” *justitia islamica* 11, No 1 (2014): 22-42.

<sup>2</sup> QS. Jatsiyah/45:13.

akal pikirannya dan berupaya mengunakannya dengan baik agar kesejahteraan bisa dicapai pada diri manusia.<sup>3</sup>

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang mengalami masalah kesejahteraan (kemiskinan). Menurut badan pusat statistika penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada Maret 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya .penduduk miskin tahun 2020 sebanyak 7,10% sedangkan pada Maret 2019 sebanyak 0,16 %. Jumlah total penduduk miskin pada pada Maret 2020 adalah 30,00 jiwa jumlah ini mengalami penurunan jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 30,49 jiwa hal ini menunjukkan terjadi penurunan 0,49 jiwa(Bulukumba, 2021). Ada beberapa hambatan yang dialami dalam peningkatan kesejahteraan di Bulukumba seperti seperti minimnya fasilitas publik, kualitas SDM yang rendah, potensi wilayah serta kondisi perekonomian<sup>4</sup> .

Pemerintah Kabupaten Bulukumba berusaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan atau kurang sejahtera melalui penerapan PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) ialah jenis bantuan yang dikeluarkan pemerintah dengan ketentuan tertentu yang ditujukan kepada Keluarga Miskin (KM) dan sudah pasti sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di dunia internasional program ini lebih dikenal sebagai program perlindungan yang menyangkut kepentingan umum atau di kenal dengan sebutan *conditional cash transfers* yang sudah terbukti menanggulan masalah kemiskinan<sup>5</sup>. PKH (Program Keluarga Harapan) mulai di laksanakan sejak 2007. Awalnya PKH di jalankan oleh 7 provinsi, 48 kabupaten/kota dan melayani 387.928 KSM namun seiring perkembangannya di tahun 2011 mengalami perkembangan dari 7 provinsi menjadi 25 provinsi 118 kabupaten/kota dan melayani 1,1 juta KSM.<sup>6</sup>

Tujuan utama PKH ialah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada kelompok masyarakat

---

<sup>3</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Hewan Dalam Perspektif al- Qur'an dan Sains* ( jakarta :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012).

<sup>4</sup>Rusdiansyah, " *Angka kemiskinan kabupaten bulukumba menurun, 9/12/ 2019*" bulukumbakab.bps.go.id ( diakses 12 Mei 2022).

<sup>5</sup>kementrian sosial, *pedoman pelaksanaan program keluarga harapan*. (2019).

<sup>6</sup>yantina yusmika Zasri & dkk, " Analisis implementasi program keluarga harapan (PKH) dan perubahan perilaku kesehatan ibu anak (KIA) pendidikan keluarga penerima manfaat (KPM) di kabupaten aceh tengah 2019", *ilmu keperawatan* 8, No 2 (2020).

miskin<sup>7</sup>. Adapun kaitan antara tujuan Program Keluarga Harapan yakni disebut juga dengan Maqashid Syariah yaitu aturan umum dalam ajaran Islam. Tujuan syariat Allah SWT bagi umatnya untuk melindungi agama demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia.<sup>8</sup>

Berdasarkan informasi awal yang penulis terima dari pendamping PKH di Desa Kambuno yakni implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Kambuno jika ditinjau dari implementasinya menurut nilai dasar ekonomi islam dari segi keadilan banyak masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah sejahtera dalam hal ini mampu memenuhi kebutuhannya akan tetapi sebagai peserta penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang sepantasnya untuk keluarga miskin. Keterlambatan tercairkannya dana bantuan bagi sebagian KPM yang harusnya cair dengan penerima lainnya akan tetapi mengalami keterlambatan, total bantuan yang cair sudah jelas nominalnya untuk setiap anggota dalam satu keluarga. Akan tetapi ini tidak seimbang dengan anggota penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga masih banyak masyarakat yang merasa menderita dan belum mendapatkan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH), Sehingga dapat dipahami bahwa prinsip keadilan sendiri belum sepenuhnya terpenuhi dan dilihat dari jaminan sosial (*takaful*) penggunaan dana yang belum sebanding.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dari itu pihak penulis kemudian tertarik untuk mengetahui seperti apa Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam di Desa Kambuno. Sehingga penelitian ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam (Studi pada PKH di Desa Kambuno Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)”.

---

<sup>7</sup>Muhammad Daud & dkk “ Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin” . *Jurnal Humaniora*2 No 1, 29-38.

<sup>8</sup>kementrian sosial, *pedoman pelaksanaan program keluarga harapan*. (2019).

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Case Study*” atau studi kasus. Creswell mendefinisikan studi kasus ialah penelitian kualitatif yang mempelajari tentang kejadian kehidupan yang pasti (*real-life*), yang terdiri dari satu atau beberapa kasus yang dewasa ini dari waktu ke waktu<sup>9</sup>. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun Sumber data yang digunakan adalah data primer, sumber data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait yakni dengan masyarakat penerima manfaat PKH dan Pendamping PKH. Sedangkan untuk data sekunder berupa daftar penerima program keluarga harapan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan diantaranya pengumpulan data, reduksi data (*data reductions*), penyajian data (*display data*), pengambilan kesimpulan

## C. PEMBAHASAN

### 1. Peserta program keluarga harapan (PKH)

Desa Kambuno merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba. Jumlah total penduduk secara keseluruhan adalah 2,368 jiwa yang tersebar di 3 Dusun yakni Dusun Mannyaha, Dusun Barugae, Dusun Asepettunge. Desa Kambuno merupakan salah satu desa yang pendidikannya masih kurang hal ini ditandai dengan adanya anak yang hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD, hal ini dikarenakan keterbatasan biaya untuk melanjutkan sekolah selain itu juga disebabkan oleh Kurangnya rasa sadar orang tua dalam hal pendidikan semisal orang tua tidak ingin menyekolahkan anaknya.

Program keluarga harapan (PKH) mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 adapun jumlah peserta PKH pada tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut.

---

<sup>9</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta: Rajawali Pers). (2014).

**Tabel 1. Jumlah Peserta PKH di Desa Kambuno Tahun 2021-2022**

| <b>Peserta PKH</b> | <b>Jumlah Penerima PKH</b> |
|--------------------|----------------------------|
| 2021               | 98 KPM                     |
| 2022               | 101 KPM                    |

Sumber : Data Desa Kambuno

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah peserta PKH dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebanyak 3 Orang yang tersebar di 3 Dusun yakni Dusun Mannyaha, Dusun Barugae Dan Dusun Asepettunge hal ini menunjukkan adanya penambahan KPM selama satu tahun ini .

## **2. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam**

Program Keluarga Harapan adalah salah satu jenis bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ditujukan untuk masyarakat sangat miskin dengan harapan pendidikan dan kesehatan masyarakat menengah kebawah dapat di perbaiki.<sup>10</sup> Pendamping PKH ialah pemeran utama dalam menyukseskan program PKH. Pendamping PKH sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang direkrut dan dikontrak kerjakan oleh Kementerian Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat dimana ia ditugaskan <sup>11</sup>

Pelaksanaan penyaluran bantuan PKH dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun yakni sebanyak 4 tahapan , nilai bantuan PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH berdasarkan indeks dan komponen bantuan sosial PKH. Penyaluran dana bantuan sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama penerima keluarga manfaat dan dapat diakses melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) <sup>12</sup>

Implementasinya PKH dalam meningkatkan kesejahteraan ditinjau dari sisi keadilan, tanggungjawab dan jaminan sosial ( *takaful* ) sebagai berikut.

<sup>10</sup>Ramziah & Mahrizal," Manajemen Program Keluarga Harapan ( Pkh ) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. *Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*9 No 1, ( 2021), 45–50.

<sup>11</sup>Nandini, R. dkk. ," Peran Pendamping Program Keluarga Harapan ( PKH ) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*" 4 No 1, ( 2018), 74–82.

<sup>12</sup>Dahlia A.E. Talumesang, Dkk. (2021). Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Talengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.

a. Keadilan

Islam memberikan pengajaran bahwa adil dapat di kerjakan disetiap waktu dan kesempatan. Berdirinya keadilan akan mengakibatkan terciptanya suatu aturan masyarakat yang selaras. Tidak hanya dibatasi dalam satu sudut pandang saja akan tetapi keadilan cakupannya luas, seperti misalnya agama, masyarakat hukum dan lain sebagainya. Dalam surah An-Nahl ayat 90 menjelaskan perintah kepada manusia untuk berlaku adil hal ini senada dengan pendapat menurut tafsiran Ibnu Katsir, Allah menyuruh hambanya supaya bersikap adil yakni tidak membeda-bedakan serta perintah melakukan kebaikan lainnya. Oleh karenanya dapat kita pahami bahwa Allah Swt memerintahkan kepada semua umat manusia untuk senantiasa berlaku adil baik dalam hal memberikan pertolongan kepada sesamanya. Dengan maksud agar penyaluran kekayaan dapat dirasakan khususnya untuk masyarakat menengah kebawah agar ia dapat merasakan kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan,

Sehingga jika ditinjau dari sisi keadilan masih terdapat peserta penerima bantuan PKH yang sudah dikategorikan sejahtera tetapi menerima program bantuan ini selain itu juga adanya keterlambatan pencairan dana sebagian KPM. Jadi dapat disimpulkan PKH belum berperan dengan baik sepenuhnya karena belum dapat memenuhi nilai keadilan.

b. Tanggungjawab

Sikap tanggung jawab harus melekat pada diri manusia baik ketika menjadi pelaku ekonomi ataupun tidak. Terlebih kepada seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam suatu negara, pemimping mempunyai tanggungjawab untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Implementasi PKH di Desa Kambuno jika ditinjau dari segi tanggung jawab baik pendamping ataupun peserta telah bertanggung jawab yakni pendamping bertanggungjawab mengkoordinir secara rutin peserta yang berhak menerima PKH sedangkan peserta PKH bertanggungjawab menggunakan dana yang diberikan pemerintah untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan.

c. Jaminan sosial (*takaful*)

Setiap negara ditugaskan untuk menyediakan jaminan sosial dengan tujuan untuk menjaga kualitas hidup semua pribadi dalam Islam. Kebutuhan dasar dibagi menjadi dua yakni kebutuhan yang sifatnya individual meliputi sandang , pangan dan papan



maupun yang sifatnya umum meliputi kesehatan , pendidikan dan rasa aman. Jaminan sosial dalam Islam menyebut jaminan sosial sebagai hal yang menjadi kewajiban bagi orang yang mempunyai kelebihan harta unntuk membantu saudaranya yang dalam hal ini kurang mampu akan kesehatan. Jika ditinjau dari nilai dasar ekonomi yaitu *takaful* belum bisa dikatakan sepenuhnya baik sebagaimana penjelasan sebelumnya ini dikarenakan tingkat kebutuhan yang banyak seperti banyaknya kebutuhan hidup sehari-hari, sebagai contoh mereka lebih mensampingkan kebutuhan

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan maka dapat ditarik simpulan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan ditinjau dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu dari sisi keadilan, tanggung jawab dan *takaful* (jaminan sosial) belum bisa dikatakan berjalan dengan baik misalnya saja jika ditinjau dari sisi *takaful* belum memberikan jaminan sosial kepada peserta PKH , ditinjau dari sisi keadilan belum berjalan secara sepenuhnya hal ini ditandai dengan ketidak tepatan sasaran yang menerima bantuan PKH, serta keterlambatan pencairan dana yang kadang dialami oleh sebagian KPM, dan ditinjau dari sisi tanggungjawab sudah berjalan dengn baik hal ini ditandai dengan pendamping ataupun peserta PKH telah memenuhi hak dan kewajibannya

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bulukumba, bps kabupaten. (2021). (<https://bulukumbakab.bps.go.id>). 2021-01-15.
- Dahlia A.E. Talumesang, dkk. (2021). Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengerantasan Kemiskinan di Desa Talengen Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Governance*, 1(2), 1-11.
- Emzir (2014) *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- kementrian agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- kementrian sosial. (2019). *pedoman pelaksanaan program keluarga harapan*.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. (2012). *Hewan Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*. jakarta :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Muhammad Daud, Y. M. (2018). mplementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora*, 2(1), 29-38.



- Mutmainah, I. dan dkk. (2021). Etika Ekonomi Islam dalam Surat An-Nahl : 90. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume, x No x*. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/dca9k>
- Nandini, R. dkk. (2018). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan ( Pkh ) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 4 (1)*, 74–82..
- Nurul Infitah. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Sumber Kejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial, 12 (1)*, 103–109.
- Purwana, A. E. (2014). kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam', *justitia islamica*, Vol. 11, 1
- QS.Jasiah/45:13*. (n.d.).
- Ramziah & Mahrizal. (2021). Manajemen Program Keluarga Harapan ( Pkh ) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. *Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, 9(1)*, 45–50.
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam, 1 (1)*.
- Rusdiansyah, Y. (2019). *Angka kemiskinan kabupaten bulukumba menurun, 9/12/ 2019*.
- Syahputra Adisanjaya, dkk. (2017). Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1)*, 88–92.
- Yuni Aliyatul Rohmah. (2015). Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan Di Kecamatan Semampir Surabaya). *Jurnal Aplikasi Administrasi, 18*, 1–8.

